

**KUALITAS PROGRAM 'INDONESIAKU' DI TRANS7 DALAM
MENERAPKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR
PROGRAM SIARAN (P3SPS)**

(Studi Kasus: Edisi 5, 20 Maret dan 3, 16 April 2018)

Oleh:

Parulian Tampubolon ¹⁾,
Irene Silviani ²⁾,
dan Khairullah ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

tampubolonparl@gmail.com ¹⁾

irensilviani@gmail.com ²⁾

khairullahbinmustafa@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This journal is entitled "The Quality of 'My Indonesia' Program at TRANS7 in Applying the Code of Conduct for Broadcasting and Broadcast Program Standards (P3SPS)". This study focuses on exploring the program in implementing P3SPS. This study uses the constructivism paradigm as an approach. In this study, researchers interviewed several research subjects who were monitors of broadcast content at the Regional Indonesian Broadcasting Commission of North Sumatra Province (KPID-SU). In this research, the results show that the 'Indonesiaku' program has quality in implementing P3SPS in the aspects of public interest, public services, broadcast program classification, journalistic principles, interviewers and language. However, on the aspect of journalistic principles, there are still editions that do not make corrections to the local government regarding problems that occur in the field. The input for P3SPS is to regulate broadcasts featuring unlicensed traditional health service providers, but this is a reality and a blurry portrait of the difficulty of access to health in this country.

Keywords: Quality, Broadcast Program, Indonesiaku, P3SPS, Mass Communication.

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul "Kualitas Program 'Indonesiaku' di TRANS7 dalam Menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)". Penelitian ini memfokuskan pada pengeksplorasian program tersebut dalam menerapkan P3SPS. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa subjek penelitian yang merupakan pemantau isi siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID-SU). Dalam penelitian ini, kami mendapatkan hasil, bahwa program 'Indonesiaku' telah berkualitas dalam menerapkan P3SPS. Baik pada aspek kepentingan publik, layanan publik, penggolongan program siaran, prinsip-prinsip jurnalistik, wawancara dan bahasa. Namun, pada aspek prinsip-prinsip jurnalistik, masih terdapat edisi yang tidak melakukan koreksi ke pemerintah setempat mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun masukan untuk P3SPS adalah mengatur terkait tayangan yang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan tradisional yang tidak berizin, namun merupakan realitas dan potret buram akan masih sulitnya akses kesehatan di negeri ini.

Kata Kunci: Kualitas, Program Siaran, Indonesiaku, P3SPS, Komunikasi Massa.

PENDAHULUAN

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program

yang jumlahnya sangat banyak, dan beragam jenisnya. Mulai dari program berita, *talk show*, *infotainment*, sinetron,

variety show, anak-anak, religi, wisata budaya dan seterusnya. Pada dasarnya, apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi, selama program itu menarik dan disukai audiens, serta tidak bertentangan dengan norma, nilai kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku.

Salah satu program tersebut ialah dokumenter. Istilah dokumenter pertama kali diperkenalkan oleh John Grierson dalam surat kabar New York Sun, pada tanggal 18 Februari 1926, dengan kutipan kalimat, “*A Creative Treatment of Actuality*” (perlakuan kreatif terhadap kejadian-kejadian aktual yang ada). Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan, namun disajikan dengan menarik (Morissan, 2008: 28).

Merujuk pada pernyataan Morissan tersebut, maka ‘Indonesiaku’ di TRANS7 termasuk ke dalam program dokumenter. Program dokumenter termasuk ke dalam kategori berita lunak, dimana memuat segala informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (*indepth*), namun tidak bersifat harus segera ditayangkan (Morissan, 2011: 27-28).

Sejatinya, program dokumenter milik TRANS7 tidak hanya ‘Indonesiaku’, tapi juga ada ‘Orang Pinggiran’, ‘Jejak Si Gundul’, dan ‘Jejak Petualang’. Namun, ‘Indonesiaku’ menarik perhatian kami, karena tayangannya menunjukkan masih banyak ‘pekerjaan rumah’ bangsa ini yang harus diselesaikan. ‘Indonesiaku’ juga menarik perhatian kami, karena telah sesuai dengan fungsi komunikasi massa, yaitu: menyebarkan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang (Cangara dan Ahira dalam Silviani, 2020: 34).

Seperti “Blang Tualang – Dimana

Kesejahteraan untuk Kami?” (edisi Senin, 5 Maret 2018) menceritakan akses jalan yang buruk, sehingga masyarakat di sana kesulitan mendapatkan air bersih dan pelayanan kesehatan yang layak. Program dokumenter ini disampaikan oleh reporter Dinda Taher;

“Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami” (edisi Selasa, 20 Maret 2018) menceritakan sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di pelosok daerah. Mulai dari infrastruktur (kondisi fisik sekolah) yang memprihatinkan, ketersediaan buku yang minim, hingga masalah kurangnya tenaga pendidik. Program dokumenter ini disampaikan oleh reporter Ryan Fernando, dan juru kamera Mellon Haryono;

“Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang” (edisi Selasa, 3 April 2018) menceritakan, Mulawarman sebagai salah satu desa di Tenggara Sebrang yang terancam beralih fungsi menjadi area tambang batu bara. Terbukti dari 96% lahan milik warga, kini hanya tersisa 4% saja. Program dokumenter ini disampaikan oleh reporter Ryan Fernando, dan juru kamera Muhammad Shobuur; dan

“Demi Lengkonglor Kami Mengabdikan” (edisi Senin, 16 April 2018) menceritakan, seorang bidan yang mengabdikan hidupnya selama 7 tahun terakhir di Desa Lengkonglor demi kesehatan masyarakat di sana. Sebagai salah satu desa terujung di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Infrastruktur kesehatannya pun sangat memprihatinkan. Begitu pula dengan kesadaran masyarakat di sana yang masih harus dibina, menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan. Program dokumenter ini disampaikan oleh reporter Ryan Fernando, dan juru kamera Adinegoro Radityo.

Penelitian ini nantinya tidak

mengukur kuantitas, artinya tidak mengukur seberapa banyak penonton yang menonton program 'Indonesiaku' di TRANS7. Tapi, lebih mengeksplorasi kualitas program tersebut dalam menerapkan P3SPS. Sebagaimana kita ketahui, P3SPS merupakan seperangkat regulasi yang dimiliki KPI dalam mengawasi lembaga penyiaran. Bila P3 adalah dasar bagi penyusunan SPS, maka SPS adalah penjabaran teknis dari P3 yang berisi tentang batasan-batasan, yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

P3SPS adalah batasan perilaku penyelenggara penyiaran yang wajib dipatuhi, agar pemanfaatan frekuensi tv sebagai ranah publik, dapat ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat yang sebesar-besarnya: memperkuat integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

P3SPS merupakan representasi etika media massa, yang mengarahkan bagaimana sebuah isi media massa ditulis atau disiarkan. Intinya, bagaimana isi pesan media massa itu 'sesuai' dengan harapan ideal semua pihak. Memang sulit dan subjektif, tetapi bukan berarti tidak bisa. Etika komunikasi massa penting, karena komunikasi massa berkaitan erat dengan banyak pihak.

Selain itu ialah karena isi komunikasi massa akan berdampak secara kognitif. Termasuk halnya dalam penyampaian program 'Indonesiaku' yang pesannya harus bersifat kepentingan umum/publik di tengah komunikannya yang jelas heterogen (Silviani, 2020: 48).

Asumsi awal kami ialah program 'Indonesiaku' tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), atau menghibur (*to entertain*), tapi juga sebagai kontrol

sosial (*to social control*), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab II, Pasal 3, Ayat (1): "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial"; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Bab II, Pasal 4, Ayat (1): "Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial".

Hal di atas juga berkesesuaian dengan pernyataan Berelson dan Steiner (dalam Silviani, 2020: 28), bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lainnya. Artinya, program 'Indonesiaku' dan lembaga penyiaran TRANS7 lewat produk jurnalistiknya telah berkualitas.

Namun, selayaknya kualitas suatu program televisi tidak hanya terbatas pada data statistik, ataupun semata karena program tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai *watchdog* (pengawas) kinerja pemerintah. Melainkan juga perlu melakukan sebuah kajian dengan pendekatan kualitatif, agar dapat menggali lebih dalam penerapan P3SPS pada program tersebut dan mengevaluasinya.

Berdasarkan observasi (pengamatan) langsung yang kami lakukan, dengan cara menonton kembali program 'Indonesiaku', maka ada empat aspek yang dapat kami gunakan dalam P3 sebagai landasan untuk membuat pedoman wawancara, seperti: d. Kepentingan Publik; n. Penggolongan Program Siaran; o. Prinsip-Prinsip Jurnalistik; serta q. Bahasa, Bendera, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Begitu pula, terdapat lima aspek yang dapat kami gunakan dalam SPS

sebagai landasan untuk membuat pedoman wawancara, seperti: d. Kepentingan Publik; e. Program Layanan Publik; n. Penggolongan Program Siaran; o. Program Siaran Jurnalistik; dan q. Bahasa, Bendera, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Dari aspek-aspek yang telah kami sebutkan ini, maka kami dapat menggali lebih dalam bagaimana kualitas program 'Indonesiaku' TRANS7 dalam menerapkan P3SPS, melalui pedoman wawancara yang telah kami susun.

Dalam penelitian ini, kami menetapkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID-SU) sebagai lokasi penelitian. Untuk menilai kualitas program 'Indonesiaku' TRANS7 dalam menerapkan P3SPS, kami mewawancarai beberapa pemantau terpilih sebagai subjek penelitian.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam kualitas program 'Indonesiaku' dalam menerapkan P3SPS, sekaligus dapat memberikan masukan atas kekurangan P3SPS. Berangkat dari pendahuluan inilah, kami tertarik untuk meneliti, bagaimana kualitas program 'Indonesiaku' di TRANS7 dalam menerapkan P3SPS?

1. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa poin penting yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese (1991), yang berkaitan dengan etika, yaitu: (1) tanggung jawab; (2) kebebasan pers; (3) masalah etis; (4) ketepatan dan objektivitas; serta (5) tindakan adil untuk semua orang.

Sebagaimana halnya dengan Barendt yang menyatakan, regulasi penyiaran penting untuk dibentuk, dan memenuhi beberapa ciri media penyiaran milik publik (*public service broadcasting*), yaitu: 1. Bersifat independen; dan 2. Memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi

jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal ini sesuai dengan pengertian komunikasi massa yang merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa, seperti salah satunya ialah televisi. Oleh karena pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa ialah bersifat umum.

Artinya pesan yang disampaikan juga bersifat heterogen, karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga bersifat serempak dan seragam, serta hubungan antar komunikator dengan komunikator sifatnya nonpribadi (Silviani, 2020: 45).

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian Kualitas Program 'Indonesiaku' di TRANS7 dalam Menerapkan P3SPS ini, menggunakan metode penalaran induktif, yang metode analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif, untuk dapat menggali lebih dalam kualitas dari program siaran tersebut dalam menerapkan P3SPS.

Kriyantono (2014: 56) menyatakan, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kasus sedalam-dalamnya, melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Adapun metode penyampaian pesan oleh komunikasi massa yaitu komunikator satu tahap, yakni komunikator mengirimkan pesan langsung kepada komunikan melalui salah satu isi siarannya, sehingga terjadilah proses satu arah (Silviani, 2020: 50).

Sekalipun tidak berbasis angka, penelitian kualitatif tetaplah ilmiah. Sebab dalam prosesnya, peneliti melalui serangkaian proses yang sistematis. Salah satunya, penelitian kualitatif menggunakan teknik *non probability sampling* untuk mengumpulkan data.

Artinya, pengambilan sampel tidak didasarkan pada rumusan statistika, tapi lebih pada subjektivitas peneliti berdasarkan masalah yang ditelitinya.

Salah satu jenis *non probability* adalah *purposive sampling*. Bungin (2015: 107) menyatakan, prosedur *purposive sampling* merupakan salah satu strategi dalam menentukan informasi yang paling umum di dalam penelitian kualitatif.

Yaitu dengan menentukan sekelompok subjek dan informan sesuai dengan kriteria terpilih, yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, yaitu para pemantau isi siaran, yang memang sehari-hari bekerja untuk menemukan pelanggaran isi siaran sesuai dengan P3SPS.

Artinya, pemilihan subjek penelitian lebih didasarkan pada kualitas kepakaran mereka, dan bukan kuantitas mereka. Musabab, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena, dan bukan untuk menggeneralisasinya.

Banyak sedikitnya informan sangat bergantung pada tahapan titik jenuh pengumpulan data (data penelitian sudah dianggap memadai untuk peneliti lakukan analisis). Baik itu data primer (hasil observasi dan transkrip wawancara), maupun data sekunder (studi dokumen).

Adapun bentuk observasi yang kami lakukan adalah observasi nonpartisan. Menurut Kriyantono (2012), observasi nonpartisan merupakan metode observasi, di mana perisetnya bertindak mengobservasi, tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diriset.

Artinya, peneliti tidak harus melebur atau menjadi bagian dari Tim 'Indonesiaku' untuk dapat melakukan pengamatan. Melainkan cukup dengan

menonton program jurnalistik tersebut, yang dapat diunduh kembali lewat *YouTube*.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Arif Fauzan Perdana, S.H; Triliensi Siregar, S.Pd.K; Riris Anita Manullang, S.Kom; dan Mawadah Sri Melva Yetti Siregar, S.E. Mereka terpilih berdasarkan hasil pantauan mereka dalam bekerja sehari-hari, dengan P3SPS sebagai panduan mereka.

Hal ini merujuk pada rekomendasi Ripka Lamsari Nona Ginting selaku Asisten Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran, yang kerap memeriksa hasil pemantauan mereka yang bagus.

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu metode Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Selain itu, menurut Sutopo (2006: 133), ada beberapa jenis triangulasi, yaitu: triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode, yakni untuk mencari data yang sama, digunakan beberapa metode berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun Mulyana (2003: 201) menyebutkan, studi kasus merupakan uraian dan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek dari seorang individu, suatu kelompok, organisasi, program, atau situasi sosial.

Artinya, studi kasus tidak hanya terbatas pada manusia dan lingkungannya, tetapi juga bisa pada media massa seperti televisi dengan program siarannya. Dalam penelitian ini, kami ingin menggali lebih dalam dan mengevaluasi program 'Indonesiaku' di TRANS7, yang ditayangkan setiap

Senin-Selasa, pukul 15.45 wib dalam menerapkan P3SPS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami telah mengumpulkan data observasi, wawancara dan studi dokumen, sehingga dapat menganalisis bagaimana kualitas program 'Indonesiaku' di TRANS7 dalam menerapkan P3SPS, sebagai berikut:

a. Aspek Kepentingan Publik

Untuk edisi Senin, 5 Maret 2018

"Blang Tualang - Di mana Kesejahteraan Kami?", Arif Fauzan Perdana, S.H (Pemantau KPID-SU) menilai, program 'Indonesiaku' TRANS7 telah memperhatikan kemanfaatan publik, karena dalam isi liputannya mengangkat tema permasalahan yang terjadi di Desa Blang Tualang, Kabupaten Aceh Timur.

"Permasalahan seperti akses jalan yang rusak, masalah ketersediaan air bersih dan juga masalah tenaga medis untuk kesehatan warga, karena ketiga permasalahan utama ini penting untuk diangkat, karena menyangkut kepentingan publik atau masyarakat, yang diharapkan akan memberikan kemanfaatan buat masyarakat, ketika pemerintah mau untuk membenahi masalah ini".

Program siaran ini tidak dimanfaatkan untuk kelompok tertentu, maupun pribadi pemilik lembaga penyiaran. *"Karena saya menilai liputan ini menceritakan keluhan dari masyarakat dari Desa Blang Tualang, yang desanya kurang diperhatikan pemerintah. Program siaran Indonesiaku, saya nilai menjaga independensi dan netralitas, karena mengangkat topik yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dan pengakuan langsung dari masyarakat Desa Blang Tualang, dan juga pengakuan dari tenaga puskesmas dari*

pihak kecamatan".

Terkhusus edisi ini, program Indonesiaku menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu dukun desa atau pengobatan alternatif, yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang. Arif Fauzan Perdana, S.H menilai hal ini tidak melanggar P3SPS, karena menampilkan realita yang sesungguhnya. Dimana masyarakat lebih memilih pergi ke dukun desa, dikarenakan akses ke puskesmas kecamatan yang sangat jauh dengan akses jalan yang tidak memadai.

Untuk edisi Selasa, 20 Maret 2018 "Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami"

Mawadah Sri Melva Yetti Siregar, SE (Pemantau KPID-SU) menilai, program 'Indonesiaku' TRANS7 telah memperhatikan aspek kepentingan publik, karena selain pemerintah, publik juga harus mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak merata.

Program siaran ini tidak dimanfaatkan untuk kelompok tertentu, maupun pribadi pemilik lembaga penyiaran. *"Berimbang, karena pihak lembaga penyiaran tidak mendapatkan keuntungan dari pihak pemerintah. Akan tetapi, dari segi tontonan mungkin mendapatkan rating yang baik"*. Program ini juga telah menjaga independensi dan netralitas isi siaran. *"Karena mereka mengeksplor pendidikan di tengah hutan Desa Suppirang"*.
Terkhusus edisi ini, program Indonesiaku tidak menampilkan jasa pelayanan kesehatan masyarakat. *"Tidak, pada saat saya melihat tayangan tersebut tidak ada menampilkan jasa pelayanan kesehatan masyarakat"*.

Untuk edisi Selasa, 3 April 2018 "Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang"

Triliensi Siregar, S.Pd.K (Pemantau KPID-SU) menilai, program

'Indonesiaku' TRANS7 masih memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan publik, karena program ini langsung terjun ke desa-desa untuk mengetahui bagaimana keadaan desa Mulawarman di tengah jerat tambang/terkepung pertambangan.

Program siaran ini tidak dimanfaatkan untuk kelompok tertentu, maupun pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya. *"Tidak, karena program siaran Indonesiaku menampilkan secara menyeluruh; Tidak, karena siaran ini tidak pernah disiarkan tentang kehidupan pribadi penyiar"*. Terkhusus, edisi ini, program 'Indonesiaku' tidak menyediakan jasa pelayanan kesehatan masyarakat.

Untuk edisi Senin, 16 April 2018 "Demi Lengklonglor Kami Mengabdikan", Riris Anita Manullang, S.Kom (Pemantau KPID-SU) menilai, TRANS7 dalam program siaran 'Indonesiaku' telah memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan publik. *"Di dalam tayangan tersebut menceritakan, bagaimana tim Indonesiaku dan seorang bidan yang mengabdikan pada sebuah desa, melakukan perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui. Seperti jalanan yang rusak, dan harus berjalan kaki jauh untuk masuk ke pemukiman warga."*

"Di samping itu, jarak puskesmas ke rumah-rumah warga cukup jauh, sehingga kehadiran bidan desa tersebut sangat diharapkan dan warga bergantung kepadanya. Banyaknya warga yang terjangkit bermacam-macam penyakit, akibat salah satunya ternak hewan yang berdekatan, dan bahkan berada di dalam rumah warga

sebagai penyebab masalah kesehatan warga sekitar".

Program siaran 'Indonesiaku' tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun pribadi milik lembaga penyiaran yang bersangkutan. Dalam program 'Indonesiaku', TRANS7 juga telah menjaga independensi dan netralitas isi siarannya. *"Di mana dalam tayangan tersebut, warga juga menyampaikan keluhan di desa tersebut mengenai akses jalan yang jauh, dan rusak untuk sampai ke puskesmas agar pemerintah dapat memperbaikinya."*

Keterangan dari pemerintah setempat juga disampaikan terkait kendala di desa Lengklonglor, bahwa tinggal menunggu tahap demi tahap akan dilakukan. Masuk kepada anggaran realisasi tahun 2018, untuk melakukan perbaikan hampir di semua hal banyak dilakukan penyelesaian di infrastuktur itu sendiri."

"Adapun untuk penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat pada program 'Indonesiaku', menurut saya memiliki izin dari lembaga yang berwenang, dikarenakan terdapat Puskesmas Ngluyu dan dicek ada Kode Puskesmas P3S18180201 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2016".

Secara keseluruhan, program 'Indonesiaku' telah memperhatikan aspek kemanfaatan dan kepentingan publik, berikut poin-poin yang terkandung di dalamnya, seperti: tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi lembaga penyiaran atau kelompok tertentu, berimbang, serta menjaga independensi dan netralitas isi siarannya. Bebas dari kepentingan

ditujukan program ini lewat isi siarannya yang mengabdikan pada kepentingan umum, dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan 'tugas suci' ini, meskipun banyak halangan yang menyertai mereka.

Secara teoritis, program 'Indonesiaku' telah menjalankan ciri-ciri media penyiaran publik, yaitu bersifat independen, serta memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana disebutkan Barendt.

b. Aspek Layanan Publik Untuk edisi **Senin, 5 Maret 2018 "Blang Tualang - Dimana Kesejahteraan Kami?"**, Arif Fauzan Perdana, S.H (Pemantau KPID-SU) menilai, program 'Indonesiaku' TRANS7 mampu mewadahi hak warga negara untuk ikut dalam pembangunan. *"Seperti menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, yaitu masalah utamanya akses jalan, masalah air bersih, dan tenaga medis kesehatan"*. Selain itu, Arif Fauzan juga menilai, program 'Indonesiaku' telah mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial. *"Karena meliputi tentang masukan terhadap pemerintah setempat, untuk bisa memperhatikan masalah di desanya. TRANS7 menjaga independensi dan netralitas isi siaran, tidak memihak kepada program tertentu"*.

Untuk edisi **Selasa, 20 Maret 2018 "Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami"**, Mawadah Sri Melva Yetti Siregar, SE (Pemantau KPID-SU) menilai, program 'Indonesiaku' TRANS7 belum terlampaui mampu mewadahi hak warga negara untuk ikut dalam pembangunan. *"Kalau untuk ikut berperan mungkin masyarakat masih bingung, karena*

pihak lembaga tidak menjelaskan, bagaimana akses masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan. Akan tetapi, untuk kiprah positifnya sangat bermanfaat buat masyarakat, karena sekolah mereka terekspos ke layar kaca". Selain itu, Mawadah juga menilai, program 'Indonesiaku' telah mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial. *"Iya, karena program Indonesiaku selalu mengekspos masyarakat- masyarakat terpencil"*.

Untuk edisi **Selasa, 3 April 2018 "Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang"**, Triliensi Siregar, S.Pd.K (Pemantau KPID-SU) menilai, program 'Indonesiaku' bisa mewadahi hak warga negara atau desa Mulawarman supaya mendapatkan kesejahteraan melalui siaran yang disiarkan, dan memberikan usul untuk reklamasi menutup kembali pertambangan menjadi lahan penghijauan. Selain itu, Triliensi juga menilai, program 'Indonesiaku' telah mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial.

Untuk edisi **Senin, 16 April 2018 "Demi Lengkonglor Kami Mengabdikan"**, Riris Anita Manullang, S.Kom menilai, program siaran 'Indonesiaku' mampu mewadahi hak warga negara. *"Di mana penjelasan dari orang-orang dalam tayangan tersebut, menjelaskan kendala-kendala baik dalam infrastruktur maupun jasa pelayanan kesehatan di desa tersebut yang harus ditangani"*. Program 'Indonesiaku' juga telah mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial. *"Di mana di dalam program tersebut menunjukkan kepada masyarakat, bagaimana sesungguhnya realita sosial*

yang ada di daerah Lengkonglor. Baik itu pemukimannya, dan kegiatan warga, serta layanan kesehatan atau akses jalannya”.

Secara keseluruhan, program ‘Indonesiaku’ telah memperhatikan aspek layanan publik, berikut poin-poin yang terkandung di dalamnya, seperti: mampu mewadahi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan telah mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial, akurat serta menjaga independensi (tidak memihak kepada pihak tertentu), dan menjaga netralitas isi siaran. Artinya, program ‘Indonesiaku’ telah terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan hanya mengabdikan pada kepentingan umum. Tim ‘Indonesiaku’ hanya akan mencari berita yang memang sungguh melayani kepentingan publik, tidak mencari berita yang hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tim ‘Indonesiaku’ juga telah berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan ‘tugas suci’ ini, meskipun banyak halangan menyertainya.

Adapun akurat (*accuracy*), artinya program ‘Indonesiaku’ telah menyiarkan berita secara tepat, objektif, cermat dan diusahakan tidak terjadi kesalahan. Secara teoritis, program ‘Indonesiaku’ telah menjalankan ciri-ciri media penyiaran publik, yaitu bersifat independen, serta memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana disebutkan Barendt.

c. Aspek Penggolongan Program Siaran
Untuk edisi Senin, 5 Maret 2018 “Blang Tualang - Di mana

Kesejahteraan Kami?”, Arif Fauzan Perdana, S.H menilai, program siaran Indonesiaku telah tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia (P, A, R, D dan SU). *“Karena tidak melanggar pada aturan P3SPS”*. Namun demikian, Arif Fauzan melihat program ‘Indonesiaku’ tidak menampilkan program siaran yang berbentuk karakter huruf. *“Seharusnya ditampilkan karena sesuai dengan aturan P3 Pasal 21 ayat (3), dan aturan SPS Pasal 33 ayat (2). Saya lihat dan perhatikan program ‘Indonesiaku’ juga tidak menyertakan imbauan atas peringatan tambahan, tentang arahan dan bimbingan orang tua yang ditayangkan di awal maupun di akhir.*

Untuk edisi Selasa, 20 Maret 2018 “Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami”, Mawadah Sri Melva Yetti Siregar, S.E. menilai, program siaran Indonesiaku tidak tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia.

Untuk edisi Selasa, 3 April 2018 “Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang”, Triliensi Siregar menilai, TRANS7 telah tunduk kepada penggolongan siaran berdasarkan usia, atau berdasarkan program acara yang disiarkan. *“TRANS7 menayangkan klasifikasi program siaran Indonesiaku, dalam bentuk karakter atau klasifikasi R-BO (Remaja - Bimbingan Orang tua)”*. TRANS7 menampilkan klasifikasi R-BO dalam program siaran Indonesiaku, di layar televisi paling bawah sepanjang/selama program acara berlangsung. TRANS7 juga menyertakan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan

dan bimbingan orang tua.

Untuk edisi Senin, 16 April 2018 “Demi Lengkonglor Kami Mengabdi”, Riris Anita Manullang, S.Kom menilai, program siaran ‘Indonesiaku’ telah tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran. *“Yaitu klasifikasi yang terdapat dalam tayangannya tentang ilmu pengetahuan mengenai ternak hewan, yang tidak baik dipelihara di dekat rumah maupun di dalam rumah, karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Termasuk infeksi saluran pernapasan, dan tuberkolosis, serta adanya nilai-nilai sosial di dalamnya agar membantu sesama yang membutuhkan.”*

“Klasifikasinya R-BO, tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja, berisi ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial. Klasifikasi program siaran ‘Indonesiaku’ diletakkan pada posisi atau layar televisi sepanjang acara berlangsung di sudut bawah”. Namun, TRANS7 tidak menyertakan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orang tua pada awal tayangan program ‘Indonesiaku’.

Secara keseluruhan, program ‘Indonesiaku’ telah memperhatikan aspek penggolongan program siaran, berikut poin-poin yang terkandung di dalamnya, seperti: ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia (dalam hal ini R-BO), menayangkan klasifikasi tersebut dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, serta meletakkannya secara jelas pada posisi atau layar televisi sepanjang acara berlangsung. Adapun jawaban pemantau yang

mengatakan, program ‘Indonesiaku’ tidak mencantumkan penggolongan program siaran, hal itu karena objek pemantauannya merupakan hasil unduhan kembali lewat *YouTube*, namun secara garis besar tidak mengurangi esensi keaslian isinya, sebagaimana pertama kali ditayangkan di TRANS7.

d. Aspek Prinsip-Prinsip Jurnalistik

Untuk edisi Senin, 5 Maret 2018

“Blang Tualang - Di mana Kesejahteraan Kami?”, Arif Fauzan Perdana, S.H. menilai, program ‘Indonesiaku’ telah menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, serta melakukan koreksi dan kontrol sosial. *“Program siaran Indonesiaku menurut saya sudah mengedepankan kepentingan publik, karena dalam isi siaran ini mengangkat permasalahan yang dialami masyarakat, seperti masalah akses jalan, air bersih, dan tenaga medis kesehatan. Program siaran ini menurut saya sudah membangun dan menegakkan demokrasi, karena bisa menjadi wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah daerahnya, agar dapat memperhatikan rakyatnya”*.

Begitu pula halnya dalam menyajikan informasi yang bersikap independen, Arif Fauzan Perdana, S.H. menilai, program ‘Indonesiaku’ telah melakukannya dengan baik. *“Karena program siaran ini lebih mengutamakan suara atau keluhan dari masyarakat mengenai desanya, dan tidak mengedepankan kelompok atau pribadi*

tertentu".

Namun demikian, Arif Fauzan Perdana, S.H. menilai, program 'Indonesiaku' masih belum mencari kebenaran dalam suatu permasalahan. *"Seperti contoh yang terjadi di Desa Blang Tualang ini, pihak 'Indonesiaku' tidak menjumpai pemerintah daerah setempat, dan mewawancarai apa yang telah terjadi di desanya ini. Artinya, menurut pemantauan Arif Fauzan Perdana, S.H. pihak 'Indonesiaku' tidak melakukan koreksi ke pemerintah setempat mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga belum mengedepankan keberimbangan dalam pemberitaannya. Secara umum, menurut pemantauan Arif Fauzan Perdana, S.H. program siaran 'Indonesiaku' tidak beriktikad buruk, tidak bertujuan menghasut dan menyesatkan, dan tidak membuat berita bohong serta fitnah. Melainkan, program siaran 'Indonesiaku' hanya mengedepankan fakta yang terjadi di lapangan.*

Untuk edisi Selasa, 20 Maret 2018 "Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami", Mawadah Sri Melva Yetti Siregar, SE menilai, program 'Indonesiaku' telah menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, serta melakukan koreksi dan kontrol sosial.

"Iya, karena dari program Indonesiaku, masyarakat tahu bahwa masih banyak pendidikan di Indonesia butuh perhatian. Iya, karena seharusnya pendidikan di Indonesia merata, tapi yang terjadi tidak. Iya, karena program

siaran Indonesiaku adalah fakta dan real. Iya, dengan mengoreksi pemerintah tahu wilayah atau pedesaan mana yang butuh bantuan. Kontrol sosial seharusnya pun menjadi perhatian kita bersama".

Secara umum, menurut pemantauan Mawadah, program siaran 'Indonesiaku' tidak beriktikad buruk, tidak bertujuan menghasut dan menyesatkan, dan tidak membuat berita bohong serta fitnah. Melainkan, program siaran 'Indonesiaku' hanya mengedepankan fakta yang terjadi di lapangan. *"Ya, bukan berita bohong, karena inilah reality Desa Suppirang yang terjadi. Fitnah bukan, karena ini bukan program untuk memfitnah siapa pun. Tayangan ini diangkat, agar pemerintah lebih aware lagi terhadap wilayah terpencil*".

Untuk edisi Selasa, 3 April 2018 "Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang", Triliensi Siregar, S.Pd.K menilai, program 'Indonesiaku' telah menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, serta melakukan koreksi dan kontrol sosial.

"Program siaran Indonesiaku menyajikan informasi untuk menyeluruh. Program siaran Indonesiaku memberikan informasi yang mampu mengajak masyarakat ikut serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, saling menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda dan bermusyawarah dalam kehidupan. Program siaran Indonesiaku menyajikan informasi yang sebenar-benarnya,

kebenaran yang ingin tercapai pun bukan sekedar akurat/sumber tepercaya, melainkan kebenaran yang praktis dan fungsional. Program siaran Indonesiaku mampu memberikan koreksi dan kontrol terhadap masyarakat”.

Begitu pula halnya dalam menyajikan informasi yang bersikap independen, Triliensi Siregar, S.Pd.K menilai, program ‘Indonesiaku’ telah melakukannya dengan baik. *“Program siaran Indonesiaku telah menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, yang menyajikan informasi yang adil, berimbang, tidak berpihak, dan tidak menghasut/menyesatkan masyarakat yang ada di desa Mulawarman”.*

Secara umum, menurut pemantauan Triliensi, S.Pd.K program siaran ‘Indonesiaku’ akurat, tidak beriktikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, dan tidak membuat berita bohong serta fitnah. Melainkan, program siaran ‘Indonesiaku’ hanya mengedepankan fakta yang terjadi di lapangan.

“Program siaran Indonesiaku TRANS7 menyajikan, menyampaikan dan menyunting berita-berita yang benar. Program siaran Indonesiaku di

TRANS7 menyampaikan/menyajikan informasi yang berimbang dan tidak ada yang merasa dirugikan, baik itu pihak tambang ataupun masyarakat Desa Mulawarman. Program siaran Indonesiaku adil terhadap apa yang harus disampaikan. Program siaran Indonesiaku menyampaikan sajian yang ditampilkan dengan etika yang baik.’

“Program siaran Indonesiaku tidak menghasut dan menyesatkan pihak apapun dalam informasi yang disajikan. Program siaran Indonesiaku benar-benar menyajikan informasi tentang kehidupan masyarakat yang terjerat pertambangan. Program siaran Indonesiaku di Desa Mulawarman adalah informasi yang benar-benar nyata, bahwa masyarakat di Desa Mulawarman terjerat pertambangan. Menurut pemantauan Triliensi, program siaran Indonesiaku juga telah menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan program siaran jurnalistiknya.

Untuk edisi Senin, 16 April 2018 “Demi Lengkonglor Kami Mengabdi”, Riris Anita Manullang, S.Kom menilai, program ‘Indonesiaku’ TRANS7 telah menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, dan melakukan koreksi dan kontrol sosial.

“Dalam tayangan tersebut terdapat kondisi maupun hal-hal tentang kehidupan warga sekitar. Mengizinkan warga sekitar berpartisipasi secara langsung dalam menyampaikan pendapat terkait kendala, dan hal yang dibutuhkan oleh warga Desa Lengkonglor. Tim Jurnalistik terjun langsung ke Desa Lengkonglor untuk merasakan kendala-kendala yang ada dan memahami keinginan warga setempat untuk mencari kebenaran. Pada tayangan tersebut terdapat penggunaan tata bahasa yang sopan dan mudah dicerna oleh orang-orang dalam penyampaian pendapatnya, yang

menurut saya sudah melakukan koreksi dan kontrol sosial”.

Program ‘Indonesiaku’ di TRANS7 dalam menyajikan informasi telah bersikap independen. *“Karena dalam tayangan tersebut tidak melakukan keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu. Penyampaian pendapat juga diambil dari beberapa warga, lurah, dan pemerintah setempat terkait Desa Lengkonglor”.*

Program ‘Indonesiaku’ TRANS7 telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik seperti akurat, berimbang, adil, tidak beriktikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi, serta tidak membuat berita bohong dan fitnah.

“Melihat dan memahami tentang kehidupan di Desa Lengkonglor, serta mewawancarai beberapa warga dan pemerintah setempat, yang pendapat mereka memiliki kesamaan dan menjadi hal yang akurat dalam proses liputan. Memuat suara oleh beberapa pihak, baik dari warganya dan pemerintah sekitar, dan adanya klarifikasi tentang kendala-kendala, serta respons dari pemerintah sekitar, sehingga dapat disebut berimbang menurut saya pribadi.”

“Tidak menyudutkan warganya dan tidak menyudutkan pemerintahnya dalam kondisi ataupun kendala-kendala terkait desa Lengkonglor. Tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Semuanya saling mendukung dalam menyampaikan pendapat. Dalam penyampaian pendapat, semua bersifat positif dan tidak menyesatkan.”

“Menurut saya, semua

berdasarkan keadaan dan peristiwa yang terjadi, dan sesuai pengambilan dokumentasi sesuai kenyataan, karena banyaknya pendapat dan dokumentasi yang mempunyai kesamaan, sehingga itu bersifat real, dan tidak bohong, serta tidak fitnah”. TRANS7 pada program ‘Indonesiaku’ juga telah menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputannya dan program siaran jurnalistiknya. *“Karena tidak menghakimi seseorang, baik itu warganya maupun pemerintahnya”.*

Secara keseluruhan, program ‘Indonesiaku’ telah memperhatikan aspek prinsip-prinsip jurnalistik, berikut poin-poin yang terkandung di dalamnya, seperti: menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik; menyajikan informasi untuk kepentingan publik; membangun dan menegakkan demokrasi; mencari kebenaran; melakukan koreksi dan kontrol sosial; menyajikan informasi secara independen, akurat, tidak beriktikad buruk, tidak bertujuan menghasut dan menyesatkan, tidak membuat berita bohong dan fitnah, serta sudah menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputannya.

Menyajikan informasi untuk kepentingan publik artinya, di sini tim ‘Indonesiaku’ telah terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan hanya mengabdikan pada kepentingan umum. Tim ‘Indonesiaku’ tidak mencari berita yang hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tim ‘Indonesiaku’ juga telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan ‘tugas suci’ ini, meskipun banyak halangan menyertainya.

Akurat artinya, di sini tim 'Indonesiaku' dalam menyiarkan program siarannya telah tepat dan objektif, cermat dan berusaha tidak terjadi kesalahan. Sementara itu, objektivitas adalah penyiaran yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bukan opini reporternya ataupun interpretasi pribadi. Namun, masih terdapat edisi dalam program 'Indonesiaku', yang tidak melakukan koreksi ke pemerintah setempat mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan, dan tidak menyertakan alasan mengapa tidak dilakukannya koreksi. Secara teoritis, program 'Indonesiaku' telah menjalankan ciri-ciri media penyiaran publik, yaitu bersifat independen, serta memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana disebutkan Barendt.

e. Aspek Pewawancara

Untuk edisi Senin, 5 Maret 2018 "Blang Tualang - Di mana Kesejahteraan Kami?", Arif Fauzan Perdana, S.H. menilai, pewawancara dalam program 'Indonesiaku' tidak menyudutkan narasumber dalam wawancaranya, karena murni berdasarkan fakta yang dikeluhkan masyarakat seperti air bersih, dan jalan rusak, serta kesehatan. *"Program siaran Indonesiaku menurut saya sudah memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan dan menjawab, karena jawabannya sudah dilengkapi fakta yang ada di lapangan. Program siaran Indonesiaku menurut saya tidak memprovokasi narasumber dan menghasut penonton, karena murni dari keluhan masyarakat mengenai*

permasalahan yang terjadi di Desa Blang Tualang, seperti masalah akses jalan, ketersediaan air bersih, dan kurangnya tenaga medis kesehatan.

Untuk edisi Selasa, 20 Maret 2018 "Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami", Mawadah Sri Melva Yetti Siregar, SE menilai, pewawancara telah bersikap netral dan tidak memihak; tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara; memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan dan/atau menjawab; serta tidak memprovokasi narasumber dan/atau menghasut penonton. *"Iya netral, karena ini program yang menampilkan untuk semua khalayak. Tidak menyudutkan, karena narasumber sendiri yang menjelaskan apa yang mereka alami. Iya, memberi waktu sangat cukup buat masyarakat Desa Suppirang untuk menjelaskan pedesaan. Tidak memprovokasi, karena ini fakta dan tidak menghasut penonton, karena publik bisa melihat dan menilai semuanya".*

Untuk edisi Selasa, 3 April 2018 "Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang", Triliensi Siregar, S.Pd.K menilai, pewawancara tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara, karena narasumber memberikan informasi dari apa yang dia lihat.

Untuk edisi Senin, 16 April 2018 "Demi Lengkonglor Kami Mengabdi", Riris Anita Manullang, S.Kom menilai, pewawancara telah bersikap netral, tidak menyudutkan narasumber, memberikan waktu yang cukup, dan tidak memprovokasi. *"Bersikap netral dan tidak memihak,*

menjelaskan sesuai dengan fakta yang ada. Tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara. Memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan ataupun menjawab. Tidak memprovokasi narasumber/menghasut penonton, tetapi menjelaskan sesuai dengan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dan tidak ada yang salah. Semua saling mendukung untuk kesejahteraan Desa Lengkonglor”.

Secara keseluruhan, program ‘Indonesiaku’ telah memperhatikan aspek pewawancara. Berikut poin-poin yang terkandung di dalamnya, seperti: tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara; sudah memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan/menjawab; tidak memprovokasi atau menghasut narasumber; serta bersikap netral dan tidak memihak.

Secara teoritis, program ‘Indonesiaku’ telah menjalankan ciri-ciri media penyiaran publik, yaitu bersifat independen, serta memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana disebutkan Barendt.

f. Aspek Bahasa

Untuk edisi Senin, 5 Maret 2018 “Blang Tualang - Di mana Kesejahteraan Kami?”, Arif Fauzan Perdana, S.H. menilai, program Indonesiaku telah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai pengantar utama. *“Karena tidak ditemukan bahasa daerah atau bahasa asing, yang digunakan sebagai bahasa pengantar utama”.*

Untuk edisi Selasa, 20 Maret 2018 “Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami”,

Mawadah Sri Melva Yetti Siregar, SE menilai, program Indonesiaku telah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai pengantar utama. *“Program siaran Indonesiaku menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik lisan maupun tulisan, karena Desa Suppirang sering berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa daerah, karena Desa Suppirang sudah menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi”.*

Untuk edisi Selasa, 3 April 2018 “Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang”, Triliensi Siregar, S.Pd.K menilai, program ‘Indonesiaku’ telah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dalam menyajikan informasi, dan sesekali menggunakan bahasa daerah untuk mendukung program siarannya.

Untuk edisi Senin, 16 April 2018 “Demi Lengkonglor Kami Mengabdi”, Riris Anita Manullang, S.Kom menilai, program ‘Indonesiaku’ telah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama, baik secara lisan maupun tulisan. Penjelasan tata bahasa juga mudah dimengerti dan dipahami. *“Iya, menggunakan bahasa daerah untuk mendukung program siarannya pada saat kunjungan ke rumah warga, untuk pemeriksaan kesehatan”.*

Secara keseluruhan, program ‘Indonesiaku’ telah memperhatikan aspek bahasa. Berikut poin-poin yang terkandung di dalamnya, seperti: telah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai pengantar utama, dan sesekali menggunakan bahasa daerah untuk mendukung program siarannya.

4. SIMPULAN

Dalam penelitian ini, kami mendapatkan hasil, bahwa program 'Indonesiaku' telah berkualitas dalam menerapkan P3SPS. Baik pada aspek kepentingan publik, layanan publik, penggolongan program siaran, prinsip-prinsip jurnalistik, pewawancara dan bahasa. Namun, pada aspek prinsip-prinsip jurnalistik, masih terdapat edisi yang tidak melakukan koreksi ke pemerintah setempat mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun masukan untuk P3SPS ke depannya adalah mengatur terkait tayangan yang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan tradisional yang tidak berizin, namun merupakan realitas dan merupakan potret buram akan masih sulitnya akses kesehatan di negeri ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana: Jakarta.
- Blang Tualang – Di mana Kesejahteraan untuk Kami (edisi Senin, 5 Maret 2018).
- Desa Suppirang, Menanti Pendidikan yang Layak untuk Kami (edisi Selasa, 20 Maret 2018).
- Desa Mulawarman, Kami yang Bertahan di tengah Jerat Tambang (edisi Selasa, 3 April 2018).
- Demi Lengkonglor Kami Mengabdikan (edisi Senin, 16 April 2018).
- Iren Silviani, 2020, Public Relations Sebagai Solusi Komunikasi Kritis. Scopindo Media Pustaka
- Iren Silviani, 2020, *Komunikasi Organisasi*. Scopindo Media Pustaka
- Kriyantono, Rachmat. 2014. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Penerbit Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Morissan. 2008. Jurnalistik Televisi Mutakhir Cetakan 1. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2003. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012.
- Shoemaker, Pamela J dan Reese, Stephen D. 1991. *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*. Longman: New York.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.